



# *Dokumen* Tahun INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU] 2021

- PERJANJIAN KINERJA [PK]
- INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]
- RENCANA AKSI KINERJA [RAK]
- RENCANA AKSI TAHUNAN [RAT]



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nama /Unit Organisasi : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Tahun Anggaran : **2021 (Renstra 2020-2024)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	Tersedianya Literatur Peraturan Perundang-undangan bidang politik yang kuat dan Penerapannya secara Baik dan Bertanggung Jawab	Persentase koleksi Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi terkait	Di dalam proses pembuatan kebijakan, pembuatan Keputusan/produk hukum, serta melakukan tindakan dalam rangka tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban di lingkungan KPU Kabupaten, membutuhkan landasan yuridis yang memadai dan komprehensif, sehingga diperlukan sebanyak mungkin Literatur Hukum terutama Peraturan Perundang-undangan sesuai dinamika dan perubahannya.	1. Undang-Undang terkait 2. Peraturan Pemerintah terkait 3. Peraturan Kementerian/Lembaga setingkat yang terkait 4. Peraturan KPU RI
		Persentase Penerapan Peraturan Perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Lombok Timur	Penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten diharapkan dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan secara efektif, sehingga senantiasa dapat dipertanggung gugatkan sebagaimana dimaksud UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	1. Produk Hukum/Keputusan/Juknis/SOP yang terkait penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten selaras dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang terkait; 2. Produk administrasi terkait tindakan administrative oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten dapat dipertanggung jawabkan.
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Partai politik merupakan stakeholder yang paling sering koordinasinya dengan Penyelenggara Pemilu, serta intensitas keperluan terhadap data dan informasi	1. AD/ART Parpol 2. Keputusan mengenai Kepengurusan Parpol 3. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
	dan berkualitas		mengenai Partai politik dalam jasa layanan administrasi pemilihan pada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan system informasi yang handal dan berkualitas untuk kelengkapan, keakuratan, dan kecepatan penyajian data Parpol	
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Lombok Timur yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi ditentukan oleh kualitas upaya transformasi aspek kelembagaan Satker pada 8 area perubahan, sehingga sumber daya kelembagaan termasuk SDM dapat menentukan tingkat pencapaian Reformasi Birokrasi, demikian sebaliknya keberhasilan Reformasi Birokrasi dapat menjadi daya ungkit dalam meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan Satker lebih lanjut. Oleh karena itu Indeks Reformasi Birokrasi, merupakan salah satu variable yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan Satker	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Output</i> dan dokumen tindak lanjut Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan : (1) <i>manajemen perubahan</i>; (2) <i>Penataan peraturan perundang-undangan</i>; (3) <i>Penataan dan Penguatan Organisasi</i>; (4) <i>Penataan Tata Laksana</i>; (5) <i>Penataan Sistem manajemen SDM ASN</i>; (6) <i>Penguatan Akuntabilitas</i>; (7) <i>Penguatan pengawasan</i>; (8) <i>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</i>;</li> <li>2. Dokumen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi</li> </ol>
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di KPU tahun 2020 yang mendapatkan penilaian Kemenpan RB tahun 2020	✓ Laporan Kinerja Tahun 2020
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Hasil opini BPK atas LK KPU Tahun 2020	✓ Opini BPK
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Terlaksananya Keterbukaan Publikasi Informasi Atas Proses, Tahapan Hingga	Laporan Hasil Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 meliputi :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
			Laporan Hasil Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tahapan Perencanaan dan Anggaran</li> <li>✓ Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;</li> <li>✓ Pembentukan Penyelenggaraan Badan Ad-HOC;</li> <li>✓ Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih</li> <li>✓ Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL);</li> <li>✓ Pencalonan Anggota DPD RI dan DPRD Kabupaten Lombok Timur;</li> <li>✓ Logistik;</li> <li>✓ Kampanye;</li> <li>✓ Laporan Dan Audit Dana Kampanye;</li> <li>✓ Sosialisasi.</li> <li>✓ dll</li> </ul>
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Total Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Daftar Pemilih Tetap</li> <li>✓ Surat Suara</li> <li>✓ Sertifikat Rekapitulasi</li> </ul>
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih Perempuan dengan Jumlah Pemilih Perempuan dalam Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2024 di 21 Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Daftar Pemilih Tetap</li> <li>✓ Surat Suara</li> <li>✓ Sertifikat Rekapitulasi</li> </ul>
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih Disabilitas dengan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2024 di 21 Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Daftar Pemilih Tetap</li> <li>✓ Surat Suara</li> <li>✓ Sertifikat Rekapitulasi</li> </ul>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Total Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar, Pemilih yang datang pada hari H tetapi tidak ada dalam DPT(DPTb)/DPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Daftar Hadir Pemilih</li> <li>✓ Daftar Pemilih Tetap</li> <li>✓ Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)</li> <li>✓ Surat Suara</li> <li>✓ Sertifikat Rekapitulasi</li> </ul>
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	KPU Kabupaten Lombok Timur Melaksanakan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal yang telah ditentukan dalam dokumen Tahapan Program dan jadwal Pemilu/Pemilihan 2024	<p>Dokumen Tahapan Program Dan Jadwal Pemilu/Pemilihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Naskah NPHD</li> <li>✓ Tahapan Kegiatan pemilu/Pemilihan</li> <li>✓ Penyusunan anggaran</li> <li>✓ Penyusunan keputusan</li> <li>✓ Pemutakhiran data</li> <li>✓ Pencalonan</li> <li>✓ Kampanye</li> </ul>
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur beserta jajaran BP Ad Hoc yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Tahun 2024 yang Aman dan Damai	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak terjadinya Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024 akibat terhambatnya Tahapan Penyediaan Logistik, Penyediaan Anggaran sampai dengan Kampanye</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan Kepolisian</li> <li>✓ Laporan Bawaslu</li> <li>✓ Terlaksananya Pengamanan disetiap Tahapan Pemilihan</li> <li>✓ Tidak terjadi pengrusakan penghilangan dan penguasaan terhadap asset Negara akibat kerusuhan massa</li> <li>✓ Total TPS tanpa ada gangguan saat Pemilu</li> </ul>
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Lombok Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Total perkara PHPU/PHP di MK atas hasil Pemilihan Umum atau dalam hal terjadi perkara PHPU/PHP sidang majelis hakim MK memberikan putusan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan Bawaslu/Panwaslu</li> <li>✓ Laporan Perkara Keberatan Dalam Pemilu</li> <li>✓ PHPU</li> <li>✓ Laporan Ke TUN</li> </ul>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
			memenangkan termohon ✓ Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan ✓ Jenis Sengketa : ✓ sengketa antar peserta pemilu dan dengan penyelenggara pemilu ✓ sengketa tata usaha negara ✓ sengketa perselisihan hasil Pemilu	✓ Laporan Ke MKS ✓ Laporan Ke DKPP ✓ Laporan Ke Mahkamah Konstitusi

Selong, 25 Januari 2021  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR



## INDIKATOR KINERJA UTAMA

### SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nama /Unit Organisasi : **SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
Tahun Anggaran : **2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Pegawai PNS Sekretariat Jenderal KPU Lombok Timur (17 Orang) yang memenuhi kompetensi berdasarkan kelulusan dalam Seleksi Jabatan, Diklat, S2 Tata Kelola Pemilu, Alih Status	✓ Dokumen Kepegawaian ✓ Undangan Diklat Teknis ✓ RUH PNS
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Lombok Timur	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Tersedianya sarana Transportasi, Fasilitas Perkantoran, Gedung dan Bangunan Kantor Di KPU Kabupaten Lombok Timur	✓ Belanja Perawatan Mesin, ✓ Belanja Perawatan Gedung Bangunan, ✓ Belanja penggantian Inventaris, Service AC, Printer dan Laptop dll ✓ Dokumen Pengadaan Gedung dan Bangunan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Lombok Timur	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lombok Timur	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di KPU tahun 2020 yang mendapatkan penilaian Kemenpan RB tahun 2020	Laporan Kinerja Tahun 2020
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Lombok Timur	Hasil opini BPK atas LK KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020	Opini BPK
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Lombok Timur	Reformasi Birokrasi ditentukan oleh kualitas upaya transformasi aspek kelembagaan Satker pada 8 area perubahan, sehingga sumber daya kelembagaan termasuk SDM dapat menentukan tingkat pencapaian	1. <i>Output</i> dan dokumen tindakan lanjut Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan : (1) <i>manajemen perubahan</i> ; (2) <i>Penataan peraturan perundang-undangan</i> ; (3) <i>Penataan dan Penguatan Organisasi</i> ; (4)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
			<p>Reformasi Birokrasi, demikian sebaliknya keberhasilan Reformasi Birokrasi dapat menjadi daya ungkit dalam meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan Satker lebih lanjut.</p> <p>Oleh karena itu Indeks Reformasi Birokrasi, merupakan salah satu variable yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan Satker</p>	<p><i>Penataan Tata Laksana;</i>(5) <i>Penataan Sistem manajemen SDM ASN;</i>(6) <i>Penguatan Akuntabilitas;</i>(7) <i>Penguatan pengawasan;</i>(8) <i>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;</i></p> <p>2. Dokumen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi</p>
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur memutakhirkan Data Pemilih secara berkelanjutan dengan Tepat Waktu	Data Kependudukan dari dinas Dukcapil dan instansi instansi lainnya
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten Lombok Timur	✓ Total Produk Hukum KPU Kabupaten Lombok Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peraturan/ Keputusan KPU Kabupaten</li> <li>✓ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Lombok Timur</li> <li>✓ Produk Hukum KPU</li> </ul>
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Jumlah PPK, PPS yang telah menerima logistik yang lengkap dan baik.	✓ Berita Acara Serah Terima Logistik



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur yang menyelenggarakan Pemilihansesuai dengan jadwal Dan tahapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tahapan Pemilu</li> <li>✓ Peraturan Pemilu</li> <li>✓ Keputusan KPU</li> </ul>

Selong, 25 Januari 2021  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SEKRETARIAT  
 LALU ADYAR ROSHI ASWANDI